



ISSN : 2338-2554  
E-ISSN : 2809 - 0691

**WIDYA PUBLIKA**  
JURNAL ILMIAH MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK  
PASCASARJANA UNIVERSITAS NGURAH RAI

**STRATEGI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR  
KAMPUS MERDEKA DI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS  
UDAYANA**

**I Ketut Suardita**

Universitas Udayana; email: ik.suardita@gmail.com

---

**Abstract**

*The Government of the Republic of Indonesia issued a policy regarding the independent campus learning program which is regulated through Permendikbud No. 3/2020, which in this policy regulates the right of students to study outside the study program for a maximum of three semesters with the aim that students have the opportunity to add insight and increase competence according to their interests, talents and ideals. This program is expected to be an answer to the demands of relatedness and conformity with the world of work. The purpose of this research is to find out and analyze the implementation of the Independent Learning Policy on the Independent Campus at the Faculty of Engineering, Udayana University and the obstacles that occur as well as to find out and analyze the solutions to the problems in implementing the MBKM policy at the Faculty of Engineering, Udayana University. Qualitative descriptive method was used in this study, where the analysis was carried out on the data that had been collected through observation, interviews, documentation, and online searches, which were then described systematically according to the existing problem formulation, analyzed by GCEdward III theory with four indicators that helped have an influence on the successful implementation of public policies, namely: communication, resources, disposition/attitude and bureaucratic structure. The results obtained indicate that the implementation of the independent learning policy at the Udayana University Faculty of Engineering has not been optimal. There are still obstacles in implementing the policy, namely: lack of communication and coordination internally and across sectors, lack of information resources, and no incentives/rewards for participants who excel. The solutions to the obstacles to implementing the independent campus learning policy at the Faculty of Engineering, Udayana University are: 1) Communication solutions: more intensive socialization, communication and coordination within the faculty and with cross-sectors regarding MBKM policies, 2) information resource solutions: parties universities to issue Rector's Regulations regarding the conversion of course grades as a reference for study programs, study programs to restructure the curriculum to accommodate MBKM implementation, 3) incentive/reward solutions: universities to issue rector regulations and guidelines on awarding participants who excel, allocate budget funds, review the workload weighting system for MBKM supervisors.*

**Keywords:** *policy implementation; independent campus; public policy; freedom to learn*

---

---

## Abstrak

---

Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan tentang program merdeka belajar kampus merdeka yang diatur melalui Permendikbud No. 3/2020, dimana pada kebijakan ini mengatur tentang hak mahasiswa untuk melakukan pembelajaran di luar program studi maksimal selama tiga semester dengan tujuan agar mahasiswa memperoleh kesempatan menambah wawasan dan meningkatkan kompetensi sesuai minat, bakat serta cita-cita yang dimiliki. Program ini diharapkan sebagai jawaban atas tuntutan keterkaitan dan kesesuaian dengan dunia kerja. Tujuan daripada penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Fakultas Teknik Universitas Udayana dan kendala-kendala yang terjadi serta untuk mengetahui dan menganalisis solusi dari kendala-kendala dalam Implementasi kebijakan MBKM di Fakultas Teknik Universitas Udayana. Metode deskriptif kualitatif digunakan pada penelitian ini, dimana analisis dilakukan terhadap data yang telah terkumpul melalui pengamatan, wawancara, dokumentasi, dan penelusuran online, yang kemudian dideskripsikan secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah yang ada, dianalisis dengan teori G.C.Edward III dengan empat indikator yang turut mempunyai pengaruh pada kesuksesan implementasi kebijakan publik yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap dan struktur birokrasi. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa implementasi kebijakan merdeka belajar kampus merdeka di Fakultas Teknik Universitas Udayana belum optimal. Masih ada kendala dalam implementasi kebijakan tersebut yaitu: kurangnya komunikasi dan koordinasi di internal dan lintas sektor, kurangnya sumber daya informasi, dan belum ada insentif/reward bagi peserta yang berprestasi. Solusi dari kendala-kendala implementasi kebijakan merdeka belajar kampus merdeka di Fakultas Teknik Universitas Udayana adalah: 1) Solusi komunikasi: lebih intensif melakukan sosialisasi, komunikasi dan koordinasi di internal fakultas dan dengan lintas sektor tentang kebijakan MBKM, 2) solusi sumber daya informasi: pihak universitas agar menerbitkan Peraturan Rektor tentang konversi nilai mata kuliah sebagai acuan bagi program studi, pihak program studi agar melakukan restrukturisasi kurikulum untuk mengakomodasi pelaksanaan MBKM, 3) solusi insentif/reward: pihak universitas agar menerbitkan peraturan rektor dan panduan tentang pemberian reward kepada peserta yang berprestasi, mengalokasikan anggaran dana, dilakukan peninjauan ulang sistem pembobotan beban kerja dosen pembimbing MBKM .

**Kata Kunci :** implementasi kebijakan; kampus merdeka; kebijakan publik; merdeka belajar

---

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1 menentukan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan (tanpa terkecuali). Semua orang di Indonesia dengan latar belakang yang berbeda tetap berhak mendapatkan pendidikan. Pendidikan itu bermanfaat untuk memperoleh pengetahuan, untuk pekerjaan/karir, pembangunan karakter, untuk pencerahan dan untuk kemajuan bangsa dan negara. Paradigma baru saat ini sangat dibutuhkan untuk melakukan reformasi atau perubahan dalam sistem pembelajaran di Indonesia untuk memperoleh strategi yang lebih efektif. Dunia pendidikan perlu mengambil sikap terkait berbagai gagasan atau ide baru pada dunia pendidikan ataupun bidang lainnya sebagai langkah untuk menggabungkan atau mengintegrasikan, sehingga dapat

tercapai suatu kondisi pendidikan yang maju akibat perubahan-perubahan inovasi tersebut.

Menjawab tantangan tersebut di atas, diperlukan suatu kebijakan dari pemerintah yang mengatur standar pendidikan tinggi di Indonesia. Peraturan Mendikbud No.3/2020 yang di dalamnya mengatur tentang program merdeka belajar. Dalam kebijakan ini, mengatur tentang hak mahasiswa untuk melakukan pembelajaran di luar program studi maksimal selama tiga semester. Mahasiswa berkesempatan menambah wawasan dan kompetensi sesuai minat dan bakat, serta cita-citanya. Proses belajar bisa dilaksanakan di manapun, tidak saja di dalam ruang kelas, laboratorium atau ruang baca, akan tetapi bisa dilakukan di dunia usaha, industri, dunia kerja, maupun di masyarakat.

Peraturan Mendikbud 3/2020 pasal 18 memberi ketentuan untuk pemenuhan beban studi bagi mahasiswa sarjana atau sarjana terapan dengan sepenuhnya mengikuti seluruh tahap pembelajaran dalam prodi pada perguruan tinggi; dan mengikuti sebagian tahapan pembelajaran di dalam prodi serta sisanya bisa mengikuti tahapan pembelajaran di luar prodi. Jawaban atas tuntutan keterkaitan dan kesesuaian antara dunia pendidikan dengan dunia kerja bisa terwujud dengan kebijakan ini. Melalui kampus merdeka bisa terwujud pembelajaran yang fleksibel dan otonom, sehingga bisa tercipta budaya belajar yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, tidak mengekang dan inovatif.

Dari hasil observasi pendahuluan dilapangan, dapat dilakukan identifikasi permasalahan yang ada pada implementasi kebijakan merdeka belajar (MBKM) di Fakultas Teknik Universitas Udayana adalah: 1) masih sedikitnya jumlah mahasiswa yang mengikuti program MBKM, 2) bentuk-bentuk kegiatan merdeka belajar kampus merdeka yang diikuti oleh mahasiswa masih tergolong sedikit yaitu baru tiga dari delapan bentuk kegiatan yang ada yaitu Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja dan Proyek Indevenden, 3) jumlah mitra kerja yang melakukan kerjasama dengan Fakultas Teknik Universitas Udayana pada implementasi program merdeka belajar (MBKM) masih sedikit.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan pada penelitian ini ialah: 1) Bagaimana Implementasi Kebijakan MBKM di

Fakultas Teknik Universitas Udayana?, 2) Apakah Kendala-kendala dalam Implementasi Kebijakan MBKM di Fakultas Teknik Universitas Udayana?, dan 3) Apakah Solusi dari kendala-kendala dalam Implementasi kebijakan MBKM di Fakultas Teknik Universitas Udayana?. Sedangkan tujuan daripada penelitian ini ialah: 1) untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Kebijakan MBKM di Universitas Udayana, 2) mengetahui dan menganalisis Kendala-kendala dalam Implementasi Kebijakan MBKM di Universitas Udayana, dan 3) mengetahui dan menganalisis Solusi dari Kendala-kendala dalam Implementasi kebijakan MBKM di Fakultas Teknik Universitas Udayana.

## **II. METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan pada penelitian yaitu metode kualitatif dengan tujuan untuk menganalisis subjek penelitian dan dideskripsikan dengan kata-kata dan kalimat dengan metode alamiah. Data-data yang diperoleh di lapangan bisa berupa kata-kata atau gambar melalui peneliti sendiri sebagai instrumen utama dalam penelitian ini. Data dikumpulkan dengan teknik observasi atau pengamatan, wawancara langsung dengan informan, studi dokumentasi dan penelusuran data *online*, peneliti sebagai instrumen kunci melakukan pengamatan secara langsung dokumen dan tingkah laku daripada manusia yang menjadi objek penelitian, melakukan wawancara langsung secara mendalam, mencari data pendukung pada dokumentasi yang ada serta melalui internet seperti jurnal dan peraturan-peraturan pendukung kemudian dideskripsikan secara mendetail dan jelas mengenai situasi pengamatan yang telah diamati.

Adapun jumlah narasumber/ informan pada penelitian ini dipilih sebanyak sepuluh orang secara *Purposive Sampling* yang mana informan tersebut dianggap yang benar-benar paling mengetahui dan paling memahami permasalahan pada penelitian ini. Kemudian data yang terkumpul dianalisis melalui beberapa alur yaitu melalui reduksi (pemilihan) data, kemudian penyajian (penyampaian) data, serta terakhir penarikan simpulan

### **III. PEMBAHASAN**

#### **A. Implementasi Kebijakan MBKM di Fakultas Teknik Universitas**

##### **Udayana**

Komunikasi dalam implementasi kebijakan MBKM sudah dilaksanakan oleh pihak Fakultas Teknik Universitas Udayana, namun hasilnya belum optimal karena penyaluran komunikasi (transmisi) tidak terlaksana dengan baik, terlihat dengan adanya perbedaan persepsi di kalangan pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran mengenai program MBKM, mengenai tata cara konversi nilai mata kuliah yang diakui, belum mengertinya kelompok sasaran dengan arti pentingnya dari program MBKM tersebut. Dengan terjadinya penyaluran komunikasi yang kurang baik sudah tentu pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran serta yang terkait tidak bisa menerima informasi secara jelas yang mengakibatkan terjadinya perbedaan persepsi yang bisa melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Diperlukan kesamaan persepsi terkait kejelasan informasi mengenai kebijakan merdeka belajar kampus merdeka. Pimpinan beserta staf dan kelompok sasaran sebagai aktor implementor harus memahami maksud dan tujuan daripada program merdeka belajar kampus merdeka. Pelaksana kebijakan harus memahami setiap butir petunjuk atau kriteria yang ada pada peraturan dan buku panduan MBKM.

Informasi sebagai bagian dari sumber daya dalam pengimplementasian kebijakan MBKM di Fakultas Teknik Universitas Udayana sudah cukup memadai namun belum optimal untuk dijadikan acuan. Sumber daya informasi yang ada berupa Permendikbud nomor 3 tahun 2020 yang diterbitkan oleh pemerintah, kemudian adanya buku panduan dan buku saku MBKM yang diterbitkan oleh Ditjendikti Kemdikbud, Buku panduan penyusunan kurikulum Ditjendikti Kemdikbud, Peraturan Rektor Universitas Udayana No.12/2020 tentang pengelolaan program MBKM, Panduan MBKM Universitas Udayana, dan buku pedoman akademik Fakultas Teknik Universitas Udayana. Namun belum ada Peraturan Rektor tentang konversi nilai mata kuliah dari bentuk kegiatan MBKM yang dilaksanakan oleh peserta MBKM, belum dilakukan restrukturisasi kurikulum yang dapat mengakomodasi secara maksimal kegiatan MBKM.

Kewenangan sudah jelas dalam pengimplementasian kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka di Fakultas Teknik Universitas Udayana. Kewenangan

penuh diberikan kepada program studi untuk melaksanakan program MBKM mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Pembagian kewenangan antara fakultas dengan program studi sudah sesuai dengan standard dan aturan yang sudah ditetapkan. Fakultas dan program studi memiliki wewenang masing-masing dalam implementasi kebijakan merdeka belajar (MBKM).

Fasilitas yang tersedia sudah cukup memadai sebagai penunjang dalam implementasi kebijakan merdeka belajar (MBKM) di Fakultas Teknik Universitas Udayana seperti Perpustakaan, Akses internet, gedung serba guna, ruang kuliah, studio tugas akhir, laboratorium, lab. komputer, parkir, kantin, taman internet, ruang pertemuan, dan ruang dosen. Sarana dan prasarana tersebut berada pada dua kampus yaitu kampus sudirman dan kampus jimbaran.

Terkait komitmen daripada pelaksana kebijakan sudah berjalan dengan optimal, yang mana sikap komitmen dari para pelaksana sudah sangat jelas dalam mendukung pengimplementasian kebijakan merdeka belajar kampus merdeka di Fakultas Teknik Universitas Udayana. Kebijakan ini sangat diperlukan agar mahasiswa siap memasuki dunia kerja dan dunia insudtri dimana program MBKM ini bisa mempercepat terwujudnya *link and macth* antar dunia pendidikan dengan dunia usaha/dunia industri.

Dukungan dari lintas sektor dan masyarakat atau dunia usaha dalam implementasi kebijakan MBKM di Fakultas Teknik Universitas Udayana sudah sangat besar. Hal ini terlihat dari berbagai program MBKM yang dikeluarkan oleh beberapa kementerian di Indonesia seperti Kementerian Sosial dengan program Pejuang Muda, Kemenkeu dengan program Pertukaran pelajar (IISMA, ICT), Kemendes PDT dengan program pemberdayaan Desa dan KKNT, Kementrian PUPR, BUMN dengan magang bersertifikat, Kominfo dengan program Bangkit. Dukungan dari dunia usaha dunia industri yang bersedia melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi untuk menerima peserta magang industri/praktik kerja.

Belum ada insentif dalam bentuk uang sebagai penghargaan bagi pelaksana kebijakan MBKM yang berprestasi, namun *reward* yang diberikan kepada pelaksana kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka di Fakultas Teknik Universitas Udayana sebagai bentuk motivasi adalah berupa beban kerja yang dikonversi menjadi remunerasi/tunjangan kinerja bagi dosen dan tenaga

kependidikan sedangkan bagi mahasiswa dalam bentuk penghargaan berupa pengakuan jumlah SKS

*Standard Operational Procedur (SOP)* yang dijadikan acuan dalam implementasi kebijakan MBKM di Fakultas Teknik Universitas Udayana sudah tersedia dalam bentuk buku panduan atau pedoman yang dikeluarkan oleh Ditjendikti Kemdikbud, Universitas Udayana, Fakultas Teknik dan Program Studi serta mitra kerja. Fragmentasi dilihat dari pembagian peran antar unit sudah sangat jelas dalam implementasian kebijakan merdeka belajar (MBKM) di Fakultas Teknik Universitas Udayana. Pembagian peran dan tanggungjawab dilakukan untuk mempermudah pelaksanaan kebijakan MBKM ini. Walaupun pembagian tugas dan atnnggungjawab sudah dilakukan oleh pelaksana kebijakan, serta sudah memiliki tugas masing-masing dan berbeda, akan tetapi masih tetap diperlukan komunikasi dan koordinasi agar tujuan dari kebijakan MBKM ini dapat terwujud sesuai dengan yang telah direncanakan.

## **B. Kendala dalam Implementasi Kebijakan MBKM di Fakultas Teknik Universitas Udayana**

### **1. Kurangnya Komunikasi dan Koordinasi di Internal dan Lintas Sektor**

Komunikasi sudah dilaksanakan secara konsisten, tapi belum semua pelaksana mendapat informasi secara langsung dari aktor implementor sehingga terjadi pemahaman yang kurang dan perbedaan dalam menangkap dan memahami informasi yang disampaikan. Sumber dari informasi yang berlainan akan menghasilkan interpretasi yang berlainan pula. Diperlukan sosialisasi dan kesamaan persepsi secara intensif mengenai kejelasan informasi tentang kebijakan merdeka belajar kampus merdeka.

Sedangkan untuk koordinasi dengan lintas sektor belum optimal dilakukan hal ini terlihat dari program-program MBKM yang dikeluarkan oleh Kementerian terkait pada waktu yang tidak berbarengan dengan masa waktu perkuliahan semester, yang menyebabkan para peserta pelaksana MBKM tidak bisa mengikuti kegiatan tersebut dikarenakan sudah berjalannya perkuliahan. Begitupula koordinasi dengan mitra kerja belum optimal dilakukan oleh Fakultas mengingat masih terjadi distorsi informasi tentang pelaksanaan MBKM terkait persyaratan-

persyaratan pelaksanaan MBKM yang harus dipenuhi oleh pihak industri maupun pihak fakultas.

## 2. Kurangnya Sumber Daya Informasi

Sumber daya informasi atau instrumen. Informasi atau instrumen sudah ada namun belum memadai, hal ini dilihat dari masih adanya keraguan dari para koordinator program studi untuk mengambil keputusan dalam melakukan konversi nilai mata kuliah dari kegiatan MBKM, hal ini dikarenakan belum adanya Peratoran Rektor Universitas Udayana tentang konversi nilai mata kuliah yang bisa dijadikan acuan atau pedoman. Belum adanya kepastian konversi nilai mata kuliah kegiatan MBKM membawa dampak kepada berkurangnya minat mahasiswa untuk mengikuti program MBKM. Kemudian kurikulum yang ada belum mengakomodasi kegiatan MBKM yang mana pada kurikulum sebaran mata kuliah wajib program studi masih terdapat pada semester atas yaitu semester 5,6,7,8, hal ini menyebabkan mahasiswa belum maksimal bisa mengikuti program MBKM pada semester tersebut di Fakultas Teknik Universitas Udayana.

## 3. Kurangnya Insentif atau *Reward*

Kurangnya reward, yaitu penghargaan bagi mahasiswa peserta MBKM yang sudah berhasil dan berprestasi dalam pelaksanaan kebijakan MBKM Reward yang ada baru sebatas pengakuan jumlah SKS sebesar 20 atau 40 atau 60 SKS bagi mahasiswa yang melaksanakan MBKM selama 1 atau 2 atau 3 semester sesuai peraturan yang ada. Sedangkan Bagi Dosen pembimbing reward yang diberikan berupa beban kerja dosen yang dikonversi menjadi remunerasi, namun besarnya masih tergolong kecil bila dibandingkan dengan sasaran MBKM yang menuntut tanggungjawab besar dalam pelaksanaannya dan program tersebut harus berjalan.

## **C. Solusi dari kendala-kendala dalam Implementasi MBKM di Fakultas Teknik Universitas Udayana**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa solusi untuk menghadapi kendala komunikasi dalam pengimplementasian kebijakan merdeka belajar kampus merdeka di Fakultas Teknik Universitas Udayana adalah komunikasi di internal fakultas, dengan semakin sering melakukan sosialisasi kepada mahasiswa tentang arti penting MBKM, adanya penyamaan persepsi antara fakultas dan program studi dalam mengantisipasi perubahan-perubahan dari



berbagai tema dalam MBKM, mengintensifkan komunikasi dan koordinasi dengan lintas sektor yaitu dengan pihak kementerian terkait agar program-program MBKM yang diluncurkan bisa berbarengan dengan masa perkuliahan persemester sehingga mahasiswa bisa mengikuti program-program tersebut, serta dengan dunia usaha dunia industri yang terlibat dalam program merdeka belajar kampus mereka (MBKM) untuk bisa memahami ketentuan dan persyaratan di dalam pelaksanaan program MBKM oleh fakultas di dunia usaha dunia industri sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan.

Informasi sebagai bagian dari sumber daya dalam pengimplementasian kebijakan bila tidak optimal dan memadai, akan mengakibatkan tidak dapat terlaksananya kebijakan secara maksimal, karena belum lengkapnya instrumen yang dijadikan acuan atau pedoman. Jika sumber daya informasi belum memadai maka yang harus dilakukan adalah segera menerbitkan instrumen atau panduan yang dibutuhkan oleh para implementor untuk melaksanakan kebijakan. Untuk itu perlu adanya pengaturan sumber daya khususnya dibidang informasi yang lebih baik agar kinerja program dapat ditingkatkan.

Solusi dalam menghadapi kendala sumber daya informasi pada pelaksanaan Kebijakan MBKM di Fakultas Teknik Universitas Udayana, berdasarkan wawancara dapat diketahui adalah segera berkomunikasi dan berkoordinasi secara intensif dengan pihak universitas untuk bisa diterbitkan Peraturan Rektor tentang Konversi Nilai Mata Kuliah sebagai acuan semua program studi di lingkungan Universitas Udayana kemudian berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak program studi agar kembali melakukan restrukturisasi kurikulum untuk mengakomodasi pelaksanaan MBKM.

Menurut pendapat G.C.Edward III, *reward* atau penghargaan merupakan bagian dari strategi untuk menanggulangi masalah kecendrungan para implementor kebijakan yaitu dengan merekayasa penghargaan atau insentif. Orang biasanya akan bergerak menurut kemauan diri sendiri, untuk itu usaha manipulasi penghargaan oleh penyusun kebijakan akan berpengaruh terhadap perbuatan para implementor kebijakan. Menambah biaya atau keuntungan tertentu, akan menjadi faktor motivasi bagi para implementor kebijakan untuk melaksanakan perintah, peran dan tanggungjawab dengan baik.

Diketahui bahwa solusi untuk menghadapi kendala insentif/*reward* dalam Implementasi Kebijakan MBKM di Fakultas Teknik Universitas Udayana adalah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak universitas untuk dapat menerbitkan peraturan rektor dan panduan tentang pemberian *reward* penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi dalam kegiatan MBKM, mengalokasikan anggaran dana pada POK fakultas, serta mengusulkan kepada rektor untuk melakukan peninjauan ulang sistem pembobotan beban kerja dosen pembimbing MBKM.

## **IV. PENUTUP**

### **4.1 Simpulan**

Dari hasil penelitian yang dijabarkan di atas, maka disimpulkan bahwa: Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Fakultas Teknik Universitas Udayana belum optimal di implementasikan, ini bisa dipantau dari beberapa indikator pengaruh keberhasilan implementasi kebijakan belum terpenuhi sesuai teori implementasi kebijakan model Geroge Edward III, yaitu komunikasi, informasi dan disposisi, serta masih ada kendala-kendala dalam implementasinya yaitu: kurangnya komunikasi dan koordinasi di internal dan lintas sektor, sumber daya informasi belum optimal dan belum adanya *reward* bagi peserta MBKM yang berprestasi. Solusi untuk mengatasi kendala-kendala implementasi kebijakan MBKM di Fakultas Teknik Universitas Udayana adalah: 1) Solusi komunikasi: lebih intensif melakukan sosialisasi, komunikasi dan koordinasi di internal fakultas dan dengan lintas sektor tentang kebijakan MBKM, 2) solusi sumber daya informasi: berkomunikasi dan berkoordinasi secara intensif dengan pihak universitas untuk bisa diterbitkan Peraturan Rektor tentang Konversi Nilai Mata Kuliah, berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak program studi agar melakukan restrukturisasi kurikulum untuk mengakomodasi pelaksanaan MBKM, 3) solusi insentif atau *reward*: berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak universitas agar menerbitkan peraturan rektor dan panduan tentang pemberian *reward* penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi dalam kegiatan MBKM, mengalokasikan anggaran dana pada POK fakultas, serta mengusulkan kepada

rektor untuk melakukan peninjauan ulang sistem pembobotan beban kerja dosen pembimbing MBKM.

#### **4.2 Saran**

Atas uraian simpulan di atas, saran yang bisa peneliti berikan terkait Implementasi MBKM di Fakultas Teknik Universitas Udayana adalah:

- a. Saran untuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian lainnya: agar senantiasa berkoordinasi dengan universitas di dalam meluncurkan program-program merdeka belajar kampus merdeka agar bisa berbarengan dengan waktu penyusunan rencana studi dalam semester sehingga kegiatan atau program-program tersebut dapat diikuti oleh para calon peserta MBKM sejak awal.
- b. Saran untuk Universitas Udayana: agar menerbitkan regulasi pendukung program MBKM untuk kelancaran implementasi kebijakan MBKM di Universitas Udayana, supaya pihak fakultas ada panduan untuk melakukan konversi nilai mata kuliah kegiatan MBKM, pemberian insentif atau *reward* bagi peserta yang berprestasi dan dosen pembimbing serta bagi staf pendukung.
- c. Saran untuk Fakultas Teknik: agar selalu mengikuti perkembangan program-program MBKM yang diluncurkan oleh pihak kementerian terkait dan mensosialisasikan secara intensif kepada pihak program studi untuk diteruskan ke para mahasiswa lebih dini sehingga mahasiswa bisa mempersiapkan segala sesuatunya terkait pelaksanaan program MBKM tersebut.
- d. Saran untuk Program Studi: agar melakukan restrukturisasi kurikulum untuk mengakomodasi pelaksanaan kegiatan program MBKM dengan menempatkan matakuliah wajib program studi pada semester 1-4 dan mata kuliah pilihan program studi pada semester 5-8, hal ini agar mahasiswa dapat mengikuti program MBKM pada semester tersebut tanpa harus memikirkan mata kuliah wajib yang masih harus diambil pada semester tersebut.
- e. Terkait kendala-kendala dalam Implementasi Kebijakan MBKM di Fakultas Teknik Universitas Udayana diharapkan Fakultas Teknik segera melakukan upaya strategis untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Upaya-upaya yang dapat ditempuh meliputi: rapat koordinasi dengan pihak rektorat dan program studi untuk membahas permasalahan implementasi kebijakan merdeka belajar

kampus merdeka dan mencari solusi bersama. Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mencari referensi guna perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan program merdeka belajar kampus merdeka.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **1. Buku**

- Achmady.Z.A. dkk. 1994. *Kebijakan Publik dan Pembangunan*. Malang: IKIP Malang.
- Agustino, Leo. 2014. *Dasar - dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Agustino, Leo. 2017. *Dasar - dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Barlian, Eri. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Padang: Sukabina Press.
- Burhan Bungin. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Burhan Bungin. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dunn N, William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Hardani dkk, 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group.
- Hill Michael dan Hupe Peter. 2002. *Implementing Public Policy*. London, Thousand Oaks, New Delhi: SAGE Publications
- Koryati, Nyimas Dwi. dkk, 2004. *Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Wilayah*. Yogyakarta: YPAPI.
- Kurniawan, Lutfi J. dan Lutfi, Mustafa. 2012. *Prihal Negara, Hukum & Kebijakan Publik*. Malang: Setara Press.
- Lubis, Solly. 2007. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Mulyana, Deddy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

- Nugroho D, Riant. 2003. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Parsons, Wayne. 2017. *Public Policy, Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Satori, Djam'an dan Komariah, Aan. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Smith, Kevin B. dan Larimer, Christopher W. 2009. *The Public Policy Theory Primer*. Amerika Serikat: Westview Press.
- Subarsono, 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Tachjan, 2006, *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI-Puslit KP2W Lemlit Unpad,
- Taufiqurokhman, 2014, *Kebijakan Pubik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers)
- Wahab, Solichin Abdul. 2011. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UMM Press.
- Widodo, Joko. 2011. *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media.
- ....., 2020, *Buku Pedoman Akademik Program Sarjana Fakultas Teknik Universitas Udayana*. Badung: FT. UNUD
- ....., 2020. *Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Udayana*. Badung: LPPM UNUD
- ....., 2020, *Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Fakultas Teknik Universitas Udayana*. Badung: UP3M FT. UNUD
- ....., 2020. *Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*. Jakarta: Ditjendikti Kemendikbud RI
- ....., 2020. *Buku Saku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*. Jakarta: Ditjendikti Kemendikbud RI

## 2. Jurnal

Ayu Putu Sri Widnyani, Ida; Made Siswa, I., 2019. Innovation in Public Services Through the Kawi Smara Program at Klungkung Regency. Iapa Proceedings Conference, [S.l.], p. 748-761, nov. 2019. ISSN 2686-6250. <https://journal.iapa.or.id/proceedings/article/view/291>. Diakses tanggal 13 Feb. 2022

Abdullah Ramdhani & Muhammad Ali Ramdhani, 2017. Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik, Jurnal Publik, Vol. 11 No. 1 Tahun 2017. diakses melalui link [https://www.researchgate.net/publication/313842407\\_Konsep\\_Umum\\_Pelaksanaan\\_Kebijakan\\_Publik](https://www.researchgate.net/publication/313842407_Konsep_Umum_Pelaksanaan_Kebijakan_Publik) tanggal 29 Nopember 2020.

Wiwi Fitriyani, 2020. Pembelajaran Inovasi Memasuki Era Pendidikan 4.0 (online) (diakses dari <https://ipmplampung.kemdikbud.go.id/detailpost/pembelajaran-inovasi-memasuki-era-pendidikan-4-0> tanggal akses 14 Nopember 2020.

### **3. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 31 (1)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.

Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

### **4. Internet**

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/06/210000269/kebijakan-publik--pengertian-tujuan-dan-ciri-ciri?page=all> Kebijakan Publik: Pengertian, Tujuan dan Ciri-ciri, di akses tanggal 14 Nopember 2020.

<https://www.kompasiana.com/rodhotunnikmah1646/5eb28039097f3613f211ee43/konsep-si-kebijakan-publik> Konsepsi Kebijakan Publik, diakses tanggal 14 Nopember 2020.

<http://www.kopertis6.or.id/component/content/article/49/4107-pengembangan-iptek-dan-pendidikan-tinggi-di-era-revolusi-industri-40.html> Pengembangan Iptek dan Pendidikan Tinggi di Era Revolusi Industri 4.0, diakses tanggal 14 Nopember 2020.

<http://dalamislamitu.blogspot.com/2012/10/analisis-kelebihan-dan-kelemahan-model.html> Analisis kelebihan dan kelemahan model implementasi kebijakan, diakses tanggal 19 Juni 2021